

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI DESA DOPLANG KECAMATAN PURWOREJO**

SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL



**Diajukan kepada Fakultas Dakwah & Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun Oleh :

Muhammad Mahmuddin Fahmi

NIM : 15250054

Pembimbing :

Khotibul Umam, M.Si.

NIP : 19880503 201903 1 014

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1230/Un.02/DD/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (DI DESA DOPLANG KECAMATAN PURWOREJO)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MAHMUDDIN FAHMI
Nomor Induk Mahasiswa : 15250054
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 62f34e517374c

Ketua Sidang/Penguji I

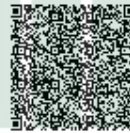
Khotibul Umam, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 628602873052a

Penguji II

Dr. H. Zaimudin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 62f70a3f327a3

Penguji III

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
SIGNED



Valid ID: 62996d18312ad

Yogyakarta, 10 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Mahmuddin Fahmi
NIM : 15250054
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan
(Studi Kasus di Desa Doplang Kecamatan Purworejo)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

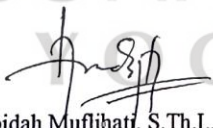
Wassalamualaikum wr. wb.

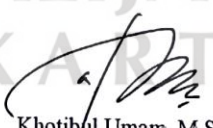
Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Mengetahui:

Sekretaris Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pembimbing


Abidah Muflihah, S.Th.I., M.Si.
NIP 19770317 200604 2 001


Khotibul Umam, M.Si.
NIP 19880503 201903 1 014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mahmuddin Fahmi
NIM : 15250054
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI KASUS DI DESA DOPLANG KECAMATAN PURWOREJO” adalah asli karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh agar diketahui oleh dewan penguji.

Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Yang menyatakan,



M. Mahmuddin Fahmi

NIM 15250054

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Allah SWT yang telah meridhoi setiap perjalanan saya dalam mengemban ilmu dan mengabdikan doa-doa dan harapan sehingga saya masih bisa bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak Haryanto dan Ibu Sartini yang telah banyak berkorban membesarkan anak lelakinya dengan segala dukungan materi dan kasih sayang. Dukungan serta doa-doa mereka tidak pernah putus untuk anak-anaknya.
- Adik-adik saya Ghufroon Nur Faozi, Hamid Nur Zaman, Wahib Qomarul Batha.
- Terkhusus untuk diri saya sendiri Muhammad Mahmuddin Fahmi yang telah berjuang keras dan mampu bertahan untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagaimana mestinya.
- Untuk Dea Novasari yang tiada henti memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi disaat sudah hampir putus asa.
- Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Berjalan tak seperti rencana adalah hal yang sudah biasa, jalan satu-satunya jalani sebaik yang kamu bisa.”

-Sirin Farid Stevi-

“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”

-QS. Al Ashr-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Sosial di UIN Sunan Kalijaga dengan judul **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI KASUS DI DESA DOPLANG KECAMATAN PURWOREJO”** yang berisi tentang upaya memberdayakan masyarakat melalui program bantuan dari pemerintah.

Peneliti menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian dan melakukan penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang berkaitan. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Marhumah, M.Pd., selaku dekan fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial.
4. Bapak Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Phal.D. selaku dosen penasihat akademik.
5. Bapak Khotibul Umam, M.Si. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang selalu membimbing dan memotivasi serta mempermudah dalam meraih gelar sarjana.
6. Seluruh dosen beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan.

7. Bapak, ibu, adik yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk tetap berjalan ke depan.
8. Seluruh keluarga yang ada di rumah, kakek, nenek, tante, om, dan juga sepupu semuanya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
9. Terkhusus untuk Pak Sidiq, sebagai pendamping PKH di Desa Dopleng sekaligus sebagai pendukung selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi.
10. Teman-teman prodi IKS angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan dukungan.
11. Semua pihak yang telah terlibat, membantu, menyemangati yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pihak-pihak yang dengan senang hati dan ikhlas mendukung serta membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna dalam penelitian tugas akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan selanjutnya.

Akhir kata peneliti berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak dan dapat menjadi sumber referensi untuk riset selanjutnya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

ABSTRAK

Kesejahteraan, kebebasan dari masalah kemiskinan, kemakmuran dan kemajuan pada tingkat ekonomi masyarakat adalah cita-cita setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dalam usahanya meningkatkan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan, masyarakat juga membutuhkan pemerintah sebagai lembaga yang memfasilitasi, melindungi dan membantu memudahkan dalam memenuhi kebutuhan serta mencapai kesejahteraan. Dalam hal tersebut pemerintah Indonesia memberikan fasilitas, bantuan, dan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program yang diberikan kepada masyarakat miskin, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Peneliti tertarik untuk mengetahui dan meneliti bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan yang dilakukan di Desa Dopleng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan), wawancara serta dokumentasi, sementara teknik analisis dengan reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik uji keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi.

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah di Desa Dopleng kepada masyarakat melalui PKH adalah dengan cara diadakannya beberapa pelatihan kewirausahaan dan pemberian penyuluhan tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, masyarakat juga diberikan pendampingan berupa motivasi moril oleh pendamping PKH dengan cara diadakannya P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) atau FDS (*Family Development Session*) yang diadakan secara rutin setiap bulan. Ada juga pola pemberdayaan lain yang dilakukan di Desa Dopleng yaitu adanya bantuan pemodalan kepada KPM melalui KUBE.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan membawa perubahan baik dalam segi ekonomi, kesehatan dan pendidikan keluarga penerima manfaat. Perubahan dalam tingkat ekonomi bagi KPM yaitu berkurangnya jumlah penerima PKH setelah program KUBE berjalan. Perubahan dalam tingkat pendidikan yaitu berupa jaminan sekolah bagi anak-anak mereka melalui pemberian dana bantuan untuk meringankan biaya pendidikan. Sehingga tidak ada lagi kasus anak putus sekolah dengan kendala biaya. Sedangkan perubahan tingkat kesehatan adalah pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan kebersihan lebih meningkat, kesehatan KPM menjadi lebih terjamin dengan adanya kegiatan Posyandu dan Posbindu, dan berkurangnya kasus anak *stunting* atau kekurangan gizi pada anak.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Program Keluarga Harapan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xixiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	10
1. Pemberdayaan Masyarakat	10
2. Program Keluarga Harapan.....	21
G. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Subjek dan Objek Penelitian	31
3. Sumber Data	32
4. Teknik Pengumpulan Data	33
5. Teknik Analisis Data.....	34
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Desa Doplang.....	37
B. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Doplang.....	41
BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA DOPLAN 51	

A. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan di Desa Dopleng	51
B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKH di Desa Dopleng.....	64
C. Perubahan Kehidupan Masyarakat Dengan Adanya Pelaksanaan PKH	70
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besaran Bantuan PKH 27

Tabel 2.1 Tabel Kesejahteraan Keluarga Desa Doplang 38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kegiatan Sharing Kelompok PKH	51
Gambar 3.2 Modul PKH	62
Gambar 3.3 Kegiatan P2K2	64
Lampiran 1 Foto Kegiatan P2K2	80
Lampiran 2 Nota Bukti Pemanfaatan PKH	83
Lampiran 3 Foto Wawancara.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan telah menjadi bagian penting dari sebuah negara. Berbagai cara, metode, aturan, alat, pendekatan, ataupun kebijakan telah dipilih dan dilakukan oleh sebuah negara dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut.¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara merupakan salah satu tujuan atau cita-cita setiap bangsa. Setiap bangsa menginginkan terciptanya masyarakat yang bebas dari kemiskinan, masyarakat yang makmur dan masyarakat yang tingkat perekonomiannya semakin maju, sehingga kesejahteraan akan tercipta.

Menurut Dampriyanto dalam buku karya Purwana, Indonesia adalah termasuk diantara negara yang menjadikan kesejahteraan bangsanya sebagai tujuannya. Rumusan kesejahteraan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, komitmen tersebut juga terjabarkan dalam batang tubuh UUD 1945, yakni Bab XIV pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.²

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat upaya untuk membangun kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan dengan memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia seperti Jaring

¹ Purwana, Eko Agung. *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (dalam jurnal *Justitia Islamica*, Vol. 11 No. 1. 2014)

² *ibid*

Pengaman Sosial (JPS), Subsidi Langsung Tunai (SLT), Beras Miskin (RASKIN), Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (ASKESKIN), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), serta program yang terakhir diluncurkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu diantara program-program penanggulangan kemiskinan tahun 2007 yang dicanangkan pemerintah. Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan PKH melalui UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindak lanjuti dengan Perpres Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan pemerintah yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan di kemudian hari pada tingkat ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pasalnya, program tersebut telah berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, PKH memiliki beberapa capaian yang sifatnya membangun dan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat. Diantara capaian yang ada pada Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain: memberikan jaminan sekolah, jaminan kesehatan ibu hamil dan bayi, pemberian edukasi tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, serta pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat miskin untuk lebih mandiri dan peduli terhadap tingkat kehidupan dan kesejahteraan di masa yang akan datang.

Dengan adanya PKH ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Purworejo khususnya yang terdapat di Desa

Doplang untuk ikut berperan serta dalam PKH yang nantinya akan memberikan peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan dan ekonomi yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan. Dapat disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdapat di Desa Doplang Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo berorientasi di bidang pendidikan dan ekonomi. Tidak semua Keluarga Penerima Manfaat bisa menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya hanya keluarga yang mempunyai ibu hamil, mempunyai anak balita, dan anak sekolah yang dapat mengaksesnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan dan diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin didasari dengan tujuan yang kuat untuk menyejahterakan masyarakat miskin. Oleh karena itu, peserta diberi bimbingan penyuluhan agar program berjalan sesuai apa yang direncanakan oleh pemerintah. Bimbingan penyuluhan yang diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan diadakannya pemberdayaan masyarakat.

Di Kabupaten Purworejo, terdapat 16 kecamatan dengan 25 kelurahan dan 469 desa yang memperoleh bantuan melalui Program Keluarga Harapan, salah satunya adalah Desa Doplang di Kecamatan Purworejo. Masyarakat miskin di Desa Doplang yang tergolong dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM), telah menjadi peserta Program Keluarga Harapan sejak tahun 2012.

Kemiskinan yang terdapat di wilayah Kabupaten Purworejo salah satu penyebabnya adalah sumber daya manusia, Rendahnya sumber daya manusia dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan dan ekonomi yang masih rendah. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu fokus pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purworejo bertambah 4,01 ribu jiwa menjadi total 88,8 ribu jiwa pada tahun 2021.³ Desa Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo merupakan lokasi yang dijadikan obyek dalam penelitian ini. Adapun sasaran pelaksanaan PKH di Desa Doplang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah buruh.

Desa Doplang merupakan salah satu desa dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang masih tergolong rendah dalam hal peningkatan ekonomi melalui wirausaha. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada penerima PKH Desa Doplang, sebagian dari KPM masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya memiliki usaha dan pentingnya meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha. Mereka lebih memilih menjadi ibu rumah tangga biasa yang penghasilannya hanya dari suami mereka dan ada juga yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), bahkan ada yang menjadi buruh cuci dan setrika. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang ada pada KPM Desa Doplang yang harus diperbaiki. Sebab peningkatan kemampuan berwirausaha dan peningkatan pendapatan dari hasil usaha adalah salah satu yang menjadi indikator keberhasilan PKH. Selain itu, Desa Doplang sendiri merupakan desa dengan potensi pendapatan masyarakat yang tinggi, karena di desa tersebut terdapat beberapa industri

³Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

yang memiliki puluhan karyawan. Sehingga apabila hal tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh KPM untuk berwirausaha dan memanfaatkan apa yang sudah diperoleh dari pemberdayaan yang ada dalam PKH, maka akan dapat mengubah pola pikir serta meningkatkan perekonomian mereka.

Kaitannya dengan pendapatan, rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh peserta PKH dari sebelum menjadi peserta sampai setelah menjadi peserta PKH bervariasi. Beberapa peserta ada yang pendapatannya semakin membaik, diantara mereka yang sebelum menjadi peserta PKH pendapatannya tergolong pada kategori masyarakat sangat miskin. Kemudian setelah menjadi peserta PKH pendapatan mereka mengalami kenaikan menjadi kategori masyarakat rentan miskin, hal tersebut juga dikarenakan mereka menerapkan ilmu yang telah didapat dari pertemuan pembinaan, memanfaatkan bantuan yang diperoleh, serta memulai berwirausaha dan mengembangkan usaha mereka. Tetapi tidak sedikit pula peserta PKH yang sejak sebelum hingga setelah menjadi peserta PKH pendapatannya masih tergolong tetap. Akan tetapi walaupun mereka yang pendapatannya masih tetap, mereka sudah mulai memperbaiki kelayakan hidup. Diantara sebagian besar dari mereka mulai memperbaiki kelayakan tempat tinggal dan fasilitas yang menunjang kelayakan hidup mereka. Oleh karena melihat perubahan pendapatan beberapa peserta yang semakin membaik dan tidak sedikit pula yang belum mengalami perubahan pendapatan, Sidiq sebagai pendamping berharap agar mereka yang belum mulai berwirausaha akan menyadari pentingnya berwirausaha dan lebih memanfaatkan

bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Harapannya dengan berwirausaha, akan menambah jumlah pendapatan dan peningkatan kesejahteraan mereka.⁴

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan peluang yang ada di Desa Doplang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, diharapkan akan dapat berdampak positif bagi KPM sebagai bagian dari masyarakat Desa Doplang. Adanya pemberdayaan dan peluang tersebut diharapkan dapat mengubah pola pikir serta dapat meningkatkan perekonomian KPM PKH Desa Doplang.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan KPM PKH melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dengan penelitian yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Desa Doplang Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berfokus pada : Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui PKH di Desa Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai oleh penyusun adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui PKH di Desa Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo.

⁴Hasil Wawancara dengan Pak Sidiq Pendamping PKH

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah referensi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk program studi ilmu kesejahteraan sosial dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan akademisi di bidang pekerjaan sosial, sebagaimana ilmu referensi hasil penelitian dan kajian ilmu kesejahteraan sosial.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengetahui proses pengembangan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan yang berlangsung di desa-desa. Sehingga dapat digunakan untuk penentuan arah strategi dan perencanaan pengembangan masyarakat. Harapan lainnya adalah agar penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan profesi pekerjaan sosial dalam melakukan praktik pekerjaan sosial khususnya terkait poin-poin yang meningkatkan aspek kesejahteraan dan pengembangan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih jauh, peneliti melakukan studi beberapa literatur sejenis sebagai bahan referensi dan acuan sebelum melakukan penelitian ini untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan saat melakukan penelitian dan sebagai landasan dasar untuk melihat perbedaan agar memperoleh keaslian. Literatur-literatur yang peneliti gunakan diantaranya adalah sebagai berikut :

Khoiruddin/16230043 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2020, Pemberdayaan Masyarakat dengan Hidroponik melalui Program Keluarga Harapan (PKH): Studi di Dusun Beji Sumberagung, Jetis, Bantul, Yogyakarta. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui PKH yang merupakan program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang dilakukan oleh pendamping dan bekerjasama dengan Praktik Pengembangan Masyarakat (PPM) UIN Sunan Kalijaga melalui pelatihan hidroponik dengan tiga tahapan yaitu penyadaran dan pembentukan perilaku, pelaksanaan pemberdayaan, dan yang terakhir tahapan peningkatan pengetahuan dan keterampilan.⁵

Aam Amaliyah/1341020008 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017, Model Pengembangan Masyarakat Berbasis Ekowisata di Desa WayMuli Induk Rajabasa Lampung Selatan. Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan masyarakat berbasis ekowisata melalui tiga proses, yaitu: (1) Pengembangan masyarakat lokal yaitu suatu usaha memajukan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi alam sebagai bentuk memandirikan. (2) Perencanaan social yaitu proses perencanaan program sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat. (3) Aksi sosial yaitu bentuk advokasi masyarakat kepada pemerintah pusat dalam menangani masalah. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah dengan adanya kegiatan pengembangan masyarakat yang berorientasi pada kelestarian alam, konsep *sustainability* dapat dicapai. karena pada hakikatnya manusia tidak bisa lepas dari alam. Keberlanjutan

⁵ Khoiruddin, *Pemberdayaan Masyarakat dengan Hidroponik Melalui Program Keluarga Harapan (PKH): Studi di Dusun Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul, Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi FDK UIN SUKA 2020)

alam harus diperhatikan karena hal ini dapat dipengaruhi terhadap kelangsungan hidup manusia. Melalui pemberdayaan dan pengetahuan, keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan alam akan tercapai.⁶

Rila Adnin Institut Pertanian Bogor pada tahun 2014, Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan. Berdasarkan analisis dari penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Program keluarga harapan adalah bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) melalui proses pendampingan untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kesehatan dan pendidikan. Peran pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat miskin mempengaruhi efektifitas keberhasilan PKH. Terdapat empat peran pendamping PKH, yakni peran dan keterampilan fasilitatif, peran dan keterampilan edukasional, peran dan keterampilan perwakilan, dan peran dan keterampilan teknis.⁷

Cahyanti Puspaningsih/50300112040 UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016. Pembinaan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan komunikasi dan pendekatan pekerjaan sosial. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan *library researchal*. Hasil penelitian ini menggambarkan tentang uapaya Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membina keluarga miskin di

⁶ Aam Amaliyah, *Model Pengembangan Masyarakat Berbasis Ekowisata di Desa WayMuli Induk Rajabasa Lampung Selatan*, (Lampung: Skripsi FDIK UIN RIL 2017)

⁷ Rila Adnin, *Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan*, (Bogor,; Skripsi Institut Pertanian Bogor Fakultas Ekologi Manusia 2014), Sumber: <https://repository.ipb.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2018

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa antara lain berupa pendekatan secara *Micro*, *Mezzo* dan *Makro* sesuai konteks pekerjaan sosial.⁸

Dari ketiga penelitian yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh para peneliti di atas, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, karena pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang pengembangan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan sebelumnya adalah pada objek dan penelitian dan tempat yang peneliti teliti, penelitian ini memfokuskan masalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Dopleng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang peneliti gunakan diantaranya yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat. Berikut penjelasan mengenai beberapa teori yang peneliti gunakan:

1. Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti.⁹

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Pada hakikatnya pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat

⁸ Cahyanti Puspaningsih, *Pembinaan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa* (Makassar: Skripsi: FDIK 2016), Sumber: Repositori.uin-alauddin.ac.id, diakses pada tanggal 15 Juli 2018

⁹ Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pemberdayaan Masyarakat Islam: dari Ideologi Strategi sampai Tradisi* (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya, 2001)

mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.¹⁰

Menurut Mubyarto, pemberdayaan secara bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.¹¹

Bahkan beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Pertama, dari aspek tujuan. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Kedua, dari aspek proses. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi, terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Ketiga, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Dan keempat, dari aspek cara-cara pemberdayaan.

¹⁰ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung : Alfabeta, 2013),

¹¹ Mubyarto. *Ekonomi Rakyat dan Program IDT* (Yogyakarta: Adtya Media. 1996)

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi, dan komunitas yang diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.¹²

Dalam bukunya Efri Syamsul Bahri, Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat, tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal. Chamber juga mengatakan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk mengangka harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Sobirin dalam buku karya Efri Syamsul Bahri, hakekat pemberdayaan adalah: pertama, pemberdayaan adalah proses, yaitu perubahan dari status yang rendah ke status yang tinggi. Kedua, pemberdayaan adalah metode, yaitu sebagai suatu pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatnya. Ketiga, pemberdayaan adalah program, yaitu sebagai tahapan-tahapan yang hasilnya terukur menuju kehidupan rakyat yang mandiri dan sejahtera. Keempat, pemberdayaan adalah gerakan, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kelima, pemberdayaan adalah pemberian otoritas, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan. Jadi pemberdayaan harus dilihat secara komprehensif dengan produk akhir masyarakat

¹² Bahri, Efri Syamsul. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. (Kediri: FAM Publishing, 2019) hal. 11

menjadi berdaya, memiliki otoritas, menjadi subjek dalam pembangunan dan kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹³

Pemberdayaan pada hakekatnya juga merupakan dakwah dalam artian mengajak kepada yang ma'ruf dan nahi munkar. Menurut Ibnu Manzbur, ma'ruf ialah semua kebaikan yang dikenal oleh jiwa dimana yang membuat hati manusia menjadi tentram. lawan dari ma'ruf yaitu kedurhakaan, perbuatan munkar adalah perbuatan yang mrnyuruh pada kedurhakaan. Dengan demikian, munkar adalah semua keburukan yang dikenal oleh jiwa manusia yang membuat hatinya tidak tentram. Dengan demikian terwujud masyarakat yang berperadaban, baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. Masyarakat yang di dalamnya saling tolong menolong dan berakhlakul karimah yang mengakui keberadaan Allah SWT sebagai Yang Maha Pencipta alam semesta.¹⁴

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.¹⁵

¹³ Bahri, Efri Syamsul. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*. (Kediri: FAM Publishing.2013) hal. 20-21

¹⁴ *Ibid hal. 14-15*

¹⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan, Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003), hal.32

Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan menggali potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan ketrampilan sebagai bekal mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat sendiri adalah terbentuknya masyarakat yang mampu berdaya saing, sehingga mampu hidup mandiri atau tidak bergantung pada pemerintah maupun pada lingkungan sekitar.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pemberdayaan dilakukan untuk memperluas pilihan masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

c. Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Isbandi Rukminto Adi, upaya untuk memberdayakan ummat/masyarakat dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu yang pertama dengan menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwiraswasta, bergelut dalam aspek ekonomi, bertindak dengan merancang munculnya diskusi tentang apa yang menjadi masalah dalam masyarakat. Yang kedua memberikan informasi tentang pengalaman kelompok lain yang telah sukses dan sejahtera. Dan yang ketiga menghubungkan masyarakat dengan sumber yang dapat dimanfaatkan.¹⁶

Upaya pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan empat unsur di dalamnya, yaitu:

¹⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: UI Press, 2003), hal. 237.

1. Aksesibilitas informasi, karena informasi merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektifitas negosiasi, dan akuntabilitas.
2. Keterlibatan dan partisipasi, yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam seluruh proses pemberdayaan.
3. Akuntabilitas, kaitannya dengan pertanggung jawaban public atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatas namakan rakyat
4. Kapasitas organisasi lokal, kaitannya dengan kemampuan bekerja sama mengorganisasikan masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Sebuah pemberdayaan masyarakat hanya akan tercapai jika unsur-unsur tersebut saling melengkapi.

d. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya agar masyarakat berdaya, maka memerlukan intervensi. Ada beberapa tahapan intervensi yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Tahapan yang dilakukan lebih dekat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat.¹⁷ Adapun tahap dalam prosese pemberdayaan masyarakat yaitu:¹⁸

1) Tahapan persiapan

¹⁷ Zubaedi, *Wawancara Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media Grup, 2007)

¹⁸ Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)

Tahap persiapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari dua hal, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal. Bila sudah ditemukan daerah yang ingin diberdayakan, petugas harus mencoba menerobos jalur formal untuk mendapatkan perizinan dari pihak terkait. Di samping itu, petugas juga harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

2) Tahap pengkajian

Proses pengkajian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Hasil pengkajian ini akan ditindak lanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

3) Tahap perencanaan alternatif kegiatan

Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya

serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4) Tahap formulasi rencana aksi

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada. Pada tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan pada jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

5) Tahap implementasi kegiatan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga.

6) Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

e. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan. Dalam Islam, strategi pemberdayaan berarti mengembangkan sistem dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam strategi pemberdayaan masyarakat terdapat 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu:¹⁹

- 1) Motivasi: dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
- 2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan: peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif.
- 3) Manajemen diri: setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat.

¹⁹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 170-171

- 4) Mobilisasi sumberdaya: untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial.
- 5) Pembangunan dan pengembangan jejaring: pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya dalam membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya.

f. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Indikator keberhasilan program yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- 2) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- 3) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dari indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat itu berdaya jika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mensejahterakan masyarakat sekitarnya dan mampu memenuhi ciri-ciri dari pemberdayaan yang baik.

Ciri-ciri program pemberdayaan yang baik yaitu:

- 1) Transparan (*transparent*): semua yang terlibat dalam proses tersebut dapat mengetahui perkembangan keuangan yang berjalan.
- 2) Bertanggung jawab (*accountable*): perhitungan dana dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
- 3) Menguntungkan (*profitable*): semua pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat khususnya keuntungan materi, baik diterima oleh pelaku pemberdayaan dan juga sasaran pemberdayaannya.
- 4) Berlanjut (*sustainable*): proses dapat dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang.
- 5) Dapat diperluas (*replicable*): program ini dapat diterapkan juga ke kelompok di wilayah lainnya.²⁰

g. Dampak Pemberdayaan Masyarakat

Dampak merupakan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan. Kegiatan tersebut adalah pembangunan ekonomi. Berbicara mengenai dampak, dampak memiliki dua sifat yaitu primer dan sekunder. Dampak primer adalah perubahan lingkungan yang terjadi disebabkan secara langsung melalui suatu kegiatan. Dampak primer meliputi dampak terhadap pola produksi,

²⁰ Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 23.

distribusi, dan konsumsi. Sedangkan dampak sekunder yaitu perubahan lingkungan yang terjadi secara tidak langsung, merupakan keberlanjutan dari dampak primer tersebut. Dari kedua dampak diatas akan terjadi dampak yang sifatnya positif dan negatif.²¹

Adapun dampak positif dan negatif dari pembangunan ekonomi diantaranya adalah; dampak positif pembangunan ekonomi yaitu, memperlancar dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya, tidak terencana dengan baik pembangunan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani.²²

Tepatnya potensi yang lebih besar dalam menggunakan sumberdaya, inisiatif, dan tenaga ahli lokal untuk mengembangkan industri lokal baru yang akan dimiliki dan dijalankan oleh orang-orang yang ada dimasyarakat lokal. Hal ini melibatkan pemanfaatan kekayaan sumber daya lokal, bakat, minat dan keahlian beserta penaksiran keuntungan-keuntungan alam dari lokalitas tentu dan kemudian memutuskan apa jenis industri baru yang mungkin berhasil.

2. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Depdikbud, 1995), hal. 87-88

²² Jim Ife & Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2008), hal. 425

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH. PKH adalah program pemerintah yang tertuang dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Tahun 2005 s/d 2025 (Undang-Undang No. 17 Tahun 2007). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Anggaran bantuan PKH berasal dari APBN, dimana kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama dari PKH untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Secara khusus, tujuan PKH yaitu:

- 1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi.
- 2) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 3) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

- 5) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 6) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan.

c. Kegiatan Program Keluarga Harapan

Kegiatan PKH terbagi atas pengelolaan di lokasi yang sudah melaksanakan PKH dan pengembangan di lokasi yang baru terjangkau kegiatan PKH. Kegiatan PKH di lokasi yang telah melaksanakan program antara lain: pendampingan, penyaluran bantuan, verifikasi, pemutakhiran data, pertemuan kemampuan keluarga (P2K2) dan transformasi kepesertaan. Sedangkan kegiatan di lokasi baru antara lain: menyediakan Kantor Sekretariat Pelaksana PKH Kabupaten/Kota, SDM pelaksanaan PKH, melakukan koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah, melakukan sosialisasi, Diklat pendamping dan Operator PKH, bimbingan teknis, melaksanakan pertemuan awal dan validasi calon peserta PKH, input data hasil validasi serta penyaluran bantuan pertama untuk peserta PKH baru.²³

d. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Keluarga Miskin (KM) dan yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak pra sekolah) dan komponen pendidikan (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat) atau

²³ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Edisi Revisi 2019*. (Jakarta, 2019).

anak usia 6-12 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta PKH atas nama ibu atau perempuan dewasa. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH.

e. Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

1) Berkaitan dengan Kesehatan

Masyarakat yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH, diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan sebagai berikut:

a) Anak usia 0 – 6 tahun

i) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.

ii) Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

iii) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan

Agustus. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

iv) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

b) Ibu hamil dan nifas

i) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.

ii) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

iii) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.

2) Berkaitan dengan pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan seperti di bawah ini:

- a) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- b) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka).
- c) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
- d) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
- e) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan program pengurangan pekerja anak.
- f) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan program kesejahteraan sosial anak.

- 3) Lansia 70 tahun ke atas
 - a) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
 - b) Mengikuti kegiatan sosial (day care).
- 4) Penyandang disabilitas berat
 - a) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan.
 - b) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*).

Bila persyaratan kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota, hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- b) Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- c) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- d) Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

f. Besaran Program Keluarga Harapan

Besar bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarganya yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Adapun besaran bantuan PKH pada tahun 2021 terbagi menjadi dua jenis, yaitu bantuan tetap dan bantuan komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Besaran Bantuan PKH

Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH	
1. Ibu hamil	Rp. 3.000.000,-/tahun
2. Anak usia dini	Rp. 3.000.000,-/tahun
3. SD	Rp. 900.000,-/tahun
4. SMP	Rp. 1.500.000,-/tahun
5. SMA	Rp. 2.000.000,-/tahun
6. Disabilitas berat	Rp. 2.400.000,-/tahun
7. Lanjut usia	Rp. 2.400.000,-/tahun

Keterangan: Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga.

g. Pendamping Sosial PKH

Pendamping sosial PKH merupakan petugas yang melakukan pendampingan bagi para KPM PKH di tingkat kecamatan. Pendampingan dilakukan untuk keseluruhan proses pelaksanaan PKH. Adapun peran pendamping sosial PKH dalam melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yaitu:

- 1) Pertemuan awal.
- 2) Validasi.
- 3) Pemutakhiran data.
- 4) Verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan.
- 5) Mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial sebagai bahan rekonsiliasi di tingkat Kabupaten/Kota.
- 6) Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).
- 7) Melaksanakan penanganan pengaduan.
- 8) Membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan.

h. Sanksi

Berdasarkan Panduan Umum PKH, dijelaskan mengenai sanksi-sanksi bagi penerima PKH maupun pendamping PKH yang apabila tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1) Sanksi Bagi Peserta PKH

Sanksi dalam hal penangguhan dan pembatalan diberlakukan apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dengan ketentuan:

- a) Tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan secara rutin setiap bulannya berupa pengurangan nominal bantuan sebesar 10% pada setiap tahapan penyaluran bantuan.

- b) Jika tiga bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan maka pengurangan nominal bantuan sebesar 100% atau tidak mendapatkan bantuan akan tetapi masih menjadi peserta PKH.
- c) Jika enam bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap layanan, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH secara permanen meskipun masih memenuhi kriteria PKH.
- d) Khusus bagi daerah pengembangan yang infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum memadai maka penerapan sanksi akan dilakukan secara bertahap.
- e) Jika dalam tiga kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut atau selama sembilan bulan peserta PKH tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
- f) Keluarga miskin yang terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PKH, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
- g) Peserta PKH yang telah dikeluarkan kepesertaannya tidak dapat diajukan kembali sebagai Peserta PKH.

2) Sanksi bagi pendamping PKH

Bagi pendamping yang keluarga miskin (KM) dampungannya tidak memenuhi kondisionalitas akan diberikan sanksi dapat berupa:

- a) Teguran secara lisan maupun tertulis.
- b) Penundaan pembayaran honorarium.
- c) Penghentian kontrak kerja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, seperti individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.²⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode penelitian kualitatif. Di mana dalam penelitian ini data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Apabila angka, maka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen-dokumen, dan lain-lain.²⁵

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Dopleng yang menjadi peserta atau anggota dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping PKH Desa Dopleng. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan

²⁴ Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal.80

²⁵ Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 51

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²⁶Saat perolehan jawaban dari responden sudah jenuh, maka pengambilan sampel dianggap sudah cukup. Dimana dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dengan kriteria telah menerima manfaat PKH sama dengan atau lebih dari 3 tahun.

b. Objek penelitian

Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pemberdayaan masyarakat di Desa Doplang yang menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Sumber Data

Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Data tersebut mempunyai peranan untuk menjelaskan secara deskriptif suatu masalah. Berdasarkan sumbernya data digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.

b. Data Sekunder

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015) hal.219

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan adalah data yang asli.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Secara umum teknik pengumpulan data terdiri beberapa kelompok, yaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa, baik berupa manusia, benda mati, maupun alam. Menurut Riyanto, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Teknik pelaksanaan observasi dapat dilaksanakan secara langsung yaitu peneliti atau pengamat berada secara langsung bersama obyek yang diteliti, dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diteliti.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung

²⁷ Tika, Mohal. Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hal. 57-58

antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.

Ada dua jenis wawancara yang lazim digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanyakan dan materi pertanyaannya. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian, seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, data tersebut harus segera dianalisis dan dituangkan dalam bentuk laporan. Adapun tujuan analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta mengungkapkan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.²⁸

²⁸ Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hal.86

Miles and Huberman menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul adalah melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa terdapat tiga kegiatan analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempetajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. Data Display

Kegiatan utama kedua dalam kegiatan analisis data adalah data display. Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.²⁹

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu

²⁹ Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta:Kencana, 2017) hal. 407-409

objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁰



³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) hal. 253

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan di Desa Doplang, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah di Desa Doplang kepada masyarakat melalui PKH adalah dengan cara diadakannya beberapa pelatihan kewirausahaan dan pemberian penyuluhan tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, masyarakat juga diberikan pendampingan berupa motivasi moril oleh pendamping PKH dengan cara diadakannya P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) atau FDS (*Family Development Session*) yang diadakan secara rutin setiap bulan. Ada juga pola pemberdayaan lain yang dilakukan di Desa Doplang yaitu adanya bantuan pemodalan kepada KPM melalui KUBE.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan membawa perubahan baik dalam segi ekonomi, kesehatan dan pendidikan keluarga penerima manfaat. Perubahan dalam tingkat ekonomi bagi KPM yaitu berkurangnya jumlah penerima PKH setelah program KUBE berjalan terdapat 2 anggota yang mengundurkan diri dari PKH dikarenakan merasa sudah mampu mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah. Perubahan dalam tingkat pendidikan yaitu berupa jaminan sekolah bagi anak-anak mereka melalui pemberian dana bantuan untuk meringankan biaya pendidikan. Sehingga tidak ada lagi kasus anak putus sekolah dengan kendala biaya. Sedangkan perubahan tingkat kesehatan adalah pengetahuan masyarakat

tentang kesehatan dan kebersihan lebih meningkat, kesehatan KPM menjadi lebih terjamin dengan adanya kegiatan Posyandu dan Posbindu, dan berkurangnya kasus anak *stunting* atau kekurangan gizi pada anak.

B. Saran

Ada beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan proses pengembangan lebih lanjut mengenai pemberdayaan melalui Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Desa Doplang, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seharusnya dapat menggunakan bantuan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan memanfaatkan bantuan untuk mulai berwirausaha agar mendapatkan pemasukan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Bagi pendamping PKH, lebih ditingkatkan lagi dalam pemberian motivasi untuk para KPM agar lebih mandiri dan tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah, serta memiliki kesadaran tentang peningkatan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dilakukan penelitian lebih dalam dan lebih kritis mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Amaliyah, (2017), *Model Pengembangan Masyarakat Berbasis Ekowisata di Desa WayMuli Induk Rajabasa Lampung Selatan, Lampung*: Skripsi FDIK UIN RIL.
- Adi, (2013), *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ayub M Padangaran, (2011), *Management Proyek Pengembangan Masyarakat*, Kendari: Unhalu Press.
- Bahri, Efri Syamsul, (2019), *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, Kediri: FAM Publishing.
- Cahyanti Puspaningsih, (2016), *Pembinaan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, Makassar: Skripsi: FDIK.
- Danim, Sudarwan, (2002), *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan, (1991), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1995), *Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Depdikbud
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, (2019), *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Edisi Revisi 2019*.

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, (2021), *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Edisi Revisi 2021*

Edi Suharto, (2014), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama.

Fredian Tonny Nasdian, (2014), *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Gunawan Sumadiningrat, (1999), *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Haris Herdiansyah, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selamba Humanika.

Husaini Usman, Purnomo Setiady, (2006), *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Isbandi Rukminto, (2003), *Pemberdayaan, Pengembangan, Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Isbandi Rukminto, (2003), *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: UI Press.

Jim Ife, Frank Tesoriero, (2008), *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar.

Kementerian Sosial RI, (2019), *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Edisi Revisi 2019*. Jakarta: Kemensos RI.

- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E, (2019), *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublishal.
- Mubyarto, (1996), *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Adtya Media.
- Nanih Machendrawati, Agus Ahmad Syafe'i, (2001), *Pemberdayaan Masyarakat Islam: dari Ideologi Strategi sampai Tradisi*, Bandung ; PT Remaja Rosdakarya.
- Noor Aflah, (2009), *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Purwana, Eko Agung, (2014), *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (dalam jurnal *Justicia Islamica*), Vol. 11 No. 1.
- Rahardjo, M. Dawan, (1999), *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Raila Adnin, (2014), *Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan*, Bogor,: Skripsi Institut Pertanian Bogor Fakultas Ekologi Manusia.
- Rosidy Ruslan, (2010), *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Saifuddin Azwar, (2010), *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo, (2008), *Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjangi, (1997), *Model Pendekatan Agama dan Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya* Jakarta: Badan Litbang Agama, Depagri.

Sugiyono, (2014), *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sumodiningrat, Gunawan, (1999), *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suryabrata, (2010), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sutrisno Hadi, (1989), *Metodologi Reserch*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset.

Tika, Mohal. Pabundu, (2006), *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, (2013), *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

www.beritasatu.com. Diakses pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 08.00 WIB.

www.liputan6.com. Diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

www.PKH.kemsos.go.id. Diakses pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 14.20 WIB.

Yusuf, Muri, (2017), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.

Zubaedi, (2007), *Wawancara Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media Grup.

Zubaedi, (2013), *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Kencana.